

Bertambah, Warga Eks Kampung Bayam yang Direlokasi ke Rusun Nagrak

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah warga eks Kampung Bayam yang sepekat direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, terus bertambah.

Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Wilayah III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Faisal Rahman mengatakan, pada awal Oktober, pihaknya telah memfasilitasi relokasi 20 KK penghuni eks Kampung Bayam di Rusun Nagrak. Kemudian, pada awal November, ada lagi 15 KK eks penghuni Kampung Bayam yang menyusul direlokasi.

"Hingga saat ini, kami tetap membuka kesempatan bagi warga penghuni eks Kampung Bayam untuk relokasi ke Rusun Nagrak," kata Faisal dalam keterangan resmi, Kamis (9/11).

Secara bertahap, lanjutnya, tambahan 15 KK eks penghuni Kampung Bayam itu mulai masuk dan menempati unit di Tower 3 Rusun Nagrak. Sama dengan warga sebelumnya, mereka juga tidak akan dikenakan biaya sewa unit.

"Mereka hanya akan

dikenakan tarif biaya air dan listrik sesuai dengan pemakaian. Pembayaran dilakukan langsung melalui autodebet Bank DKI," jelasnya.

Salah seorang penghuni eks Kampung Bayam, Jeliana Siagian mengakui fasilitas relokasi di Rusun Nagrak merupakan opsi terbaik sambil menunggu kepastian kelanjutan nasib mereka.

"Dengan tinggal di unit Rusun Nagrak, kami bisa menekan pengeluaran untuk sewa rumah," ungkapnya.

Sebelumnya, warga eks Kampung Bayam menanti janji Pemprov DKI untuk direlokasi ke Kampung Susun Bayam yang dibangun berdekatan dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS).

Kampung Bayam adalah satu dari beberapa permukiman liar yang direlokasi untuk kepentingan pembangunan JIS. Namun, hingga Kampung Susun Bayam dan JIS rampung, PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI belum juga memindahkan warga ke Kampung Susun Bayam.

Permasalahan pengelolaan aset lahan menjadi penyebab Kampung Susun Bayam hingga kini belum dapat dihuni. ● yan

Legislator Minta Pemprov dan Polda Metro Jaya Tetap Terapkan Tilang Emisi

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI, Pantas Nainggolan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tetap melanjutkan tilang uji emisi kepada masyarakat untuk menekan polusi udara di Jakarta.

"Untuk penegakan maka perlu ada pengawasan pemerintah yang bisa diwujudkan melalui sanksi tilang," kata Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/11).

Pantas menuturkan tetap perlu adanya sanksi tilang sebagai efek jera agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan uji emisi pada kendaraan miliknya.

Seharusnya sanksi tilang pemilik kendaraan yang belum lolos uji emisi bisa dibuat laporan agar program bisa terus berkesinambungan.

Terlebih, menurut dia, penyumbang polusi udara terbesar yakni kendaraan bermotor, maka dari itu perlu upaya dan dukungan masyarakat untuk tetap bisa menjaga udara Jakarta tetap bersih.

"Perlu ada semacam ancaman hukuman namun juga ada pendekatan dengan edukasi seperti perawatan kendaraan," tegasnya.

Selain itu, dia juga menyarankan agar kewajiban uji emisi kendaraan bisa menjadi persyaratan dalam

perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sebagai langkah pengawasan.

"Bisa juga diperketat melalui STNK, paling tidak tiga bulan atau setiap tahun dicek," tuturnya.

Dengan demikian, dia mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berkoordinasi untuk membahas keberlanjutan uji emisi itu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berkoordinasi untuk memformulasikan sanksi tilang bagi kendaraan yang belum atau tidak lolos uji emisi di Jakarta.

"Ya pasti kami akan koordinasi terus dengan berbagai pihak, dengan KLHK, Polda Metro dan juga dengan seluruh yang ada di satgas di antaranya dengan satpol PP terkait sanksi tilang uji emisi, formulasi lebih lanjut untuk pelaksanaannya dan bekerja sama juga dengan beberapa pihak," kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta, Ani Ruspiatwati dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Jumat lalu.

● yan

Stasiun Pondok Rajeg Bakal Diaktifkan Kembali oleh PT KAI

JAKARTA (IM) - Kabar gembira untuk warga Depok dan sekitarnya, karena Stasiun Pondok Rajeg yang berada di lintas jalur KA Citayam-Nambo akan diaktifkan kembali oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.

Dari informasi yang dihimpun, progres pembangunan stasiun Pondok Rajeg sudah memasuki progres 90 persen.

Setelah 17 tahun tidak melayani naik turun penumpang, stasiun Pondok Rajeg sendiri mulai beroperasi pada tahun 1999 sampai dengan 2006.

Kemudian di nonaktifkan dan tidak melayani penumpang mulai tahun 2006.

Setelah lama tak terdengar, Stasiun Pondok Rajeg dikabarkan dibangun kembali pada tahun 2022 sampai dengan 2023 hingga

perpanjangan peron yang terdiri dari 10 kereta.

Mengutip dari salah satu warganet di media sosial TikTok @bimaa-gustia, pagar pemasangan rel dan tembok sisi selatan di Stasiun Pondok Rajeg sudah terpasang rapi kerangkanya.

Terlihat dalam video, tulisan 'Stasiun Pondok Rajeg' juga sudah terpasang dan terpampang jelas dengan tambahan logo Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kemudian, bangunan inti stasiun juga nampak selesai dibangun yang mana terlihat ruang Kepala Stasiun (KS), ruang announcer atau pengumuman, mushola dan toilet memasuki tahap penyelesaian.

Di samping itu, Stasiun Pondok Rajeg ini menyediakan ruang yang masih asri saat berada di peronnya. Dari peron, terlihat hamparan perkebunan, sawah dan permukiman warga menghiasi suasana Stasiun Pondok Rajeg. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS DI BKN

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis (9/11). Pemerintah mulai Kamis (9/11) melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat (10/11).

Jakarta Tak Lagi Kota Ramah Sepeda, Kepala Dishub DKI Beri Pembelaan

Pemprov DKI terus mendukung penyediaan jalur sepeda yang aman, selamat, dan nyaman bagi masyarakat Ibu Kota. "Komitmen dukungan penyediaan jalur sepeda tetap dilanjutkan secara masif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menanggapi langkah Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia yang mencabut predikat 'Kota Ramah Sepeda' bagi DKI Jakarta. Penghargaan itu diberikan pada 2021 pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

Syafrin menjelaskan, pi-

haknya terus mendukung penyediaan jalur sepeda yang aman, selamat, dan nyaman bagi masyarakat Ibu Kota. "Komitmen dukungan penyediaan jalur sepeda tetap dilanjutkan secara masif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Syafrin saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis (9/11).

Syafrin mengaku, memi-

liki target untuk mengoptimalkan jalur sepeda yang telah terbangun sepanjang 314,196 kilometer (km) dengan melakukan pemeliharaan sesuai pentahapan sampai 2026. Dengan rincian, 19 ruas jalan pada 2024, 43 ruas jalan pada 2025, dan 34 ruas jalan pada 2026.

"Upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap keberlanjutan dan keberadaan jalur sepeda merupakan wujud nyata bukti komitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, ramah pesepeda dan mampu bersaing menjadi kota global," kata Syafrin.

Menurut dia, pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta dimulai pada 2012 sampai 2022 sepanjang 301,084 km, kini telah melampaui target. Seperti yang telah tertuang

dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 sepanjang 252,1 km dan Instruksi Sekda Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah terbangunnya jalur sepeda total 298 km.

"Pada tahun 2023, dilakukan dukungan terhadap penyediaan jalur sepeda dengan melakukan pembangunan serta pemeliharaan terhadap jalur sepeda," kata Syafrin.

Pada 2023, menurut Syafrin, jalur sepeda sepanjang 13,11 km dibangun di tiga kawasan yang meliputi Blok M, Barito, dan Tebet. Pembangunan jalur sepeda sebagai first mile dan last mile telah menjangkau layanan rute angkutan massal dan simpul transportasi, yaitu halte Transjakarta, stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KRL, dan terminal bus.

"Dengan adanya pembangunan jalur sepeda baru tersebut, total jaringan jalur sepeda yang telah terbangun oleh Dishub DKI dari tahun 2012 sampai dengan 2023 sepanjang 314,196 km," kata Syafrin.

Selain itu, Syafrin juga melakukan keamanan dan keselamatan untuk para pesepeda. Salah satunya, seperti pembongkaran *stick cone* jalur sepeda yang mengalami kerusakan dikarenakan tertabrak oleh kendaraan bermotor dan tidak diketahui waktu kejadiannya.

"Dengan demikian, masyarakat dapat bersepeda dengan aman dan selamat. Terhadap *stick cone* yang mengalami kerusakan dilakukan penggantian dengan pemasangan paku jalan solar cell," kata Syafrin. ● yan

Pemkot Jakpus Gelar Job Fair, Ada 2.204 Lowongan Pekerjaan

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertrans) Jakarta Pusat menggelar job fair di Mall Thamrin City, Tanah Abang. Sebanyak 2.204 lowongan pekerjaan tersedia dalam event ini.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan, job fair ini merupakan langkah pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.

"Job Fair digelar dari 8-9 November dengan 2.204 lowongan pekerjaan," ujar Dhany dikutip dalam laman resmi Pemprov DKI, Kamis (9/11).

Kepala Suku Dinas Nakertrans Jakarta Pusat, Sudrajat menambahkan, job fair

yang digelar kali ini diikuti sebanyak 40 perusahaan. "Target kami satu hari ada 1.000-2.000 pengunjung," ujarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, lanjut dia, tingkat pengangguran terbuka di DKI per Agustus mencapai 6,53 persen.

Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus di Jakarta Pusat, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,88 persen dengan jumlah 27.185 orang.

"Job Fair menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Jakarta Pusat," pungkasnya. ● yan



PEMBEKALAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat mengikuti pembekalan di Jakarta, Kamis (9/11). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar pemberian pembekalan kepada 1.500 calon PMI yang akan ditempatkan di Korea Selatan.

Ada Pemilu, Jakpro Usul Balap Formula E 2024 di Jakarta Diundur

JAKARTA (IM) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku sedang mengusulkan agar ajang penyelenggaraan balap Formula E 2024 di DKI Jakarta diundur. Langkah tersebut dilakukan mempertimbangkan situasi dan kondisi adanya pemilu di Jakarta pada 2024, sekaligus mengupayakan balapan mo-

bil listrik tersebut tetap bisa terselenggara di Ibu Kota.

"Kami usulkan karena risikonya, melihat risiko dan kondisinya. Itu usulan," ujar Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11).

Iwan menegaskan, penjadwalan ulang Formula E 2024

di Jakarta menjadi salah satu pembahasan bersama Formula E Operation (FEO) selaku penyelenggara utama. "Ya tidak apa-apa (kalau mundur), itu sudah termasuk yang kami komunikasikan," jelas Iwan.

Diberitakan sebelumnya, Federation Internationale de l'Automobile (FIA) mengumumkan ajang Formula E 2024 kemungkinan besar batal digelar di Jakarta.

Dalam keterangan resminya, FIA menyebut DKI Jakarta dicoret dari daftar kalender balapan musim ke-10 Formula E karena jadwal balapan yang "bertrokk" dengan agenda kampanye Pemilu 2024. "Acara yang direncanakan di Jakarta pada hari Sabtu, 8 Juni, tidak akan dilaksanakan setelah diumumkannya masa kampanye dalam pemilihan presiden Indonesia sepanjang bulan Juni," demikian dikutip Jumat (20/10/2023) lalu. FIA khawatir pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia pada 2024 berdampak pada pengiriman logistik untuk keperluan balapan. ● yan

<p>PT KRAKATAU POSCO Berdomisili di Cilegon, Banten ("Perseroan")</p> <p>PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAMBILALIHAN</p> <p>POSCO telah mengambil alih saham dengan lima puluh persen (50%) hak suara dari Perseroan. Pengambilalihan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2023.</p> <p>Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Cilegon, Banten, 10 November 2023 Direksi PT KRAKATAU POSCO</p>	<p>PT POSCO INDONESIA JAKARTA PROCESSING CENTER Berdomisili di Karawang Jawa Barat ("Perseroan")</p> <p>PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAMBILALIHAN</p> <p>POSCO telah mengambil alih saham dengan tujuh puluh lima persen (70,5%) dari jumlah seluruh saham Perseroan. Pengambilalihan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2023.</p> <p>Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Karawang Jawa Barat, 10 November 2023 Direksi PT POSCO INDONESIA JAKARTA PROCESSING CENTER</p>
---	--

PENGUMUMAN

Berdasarkan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT FIDELITAS ALFA OMEGA berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 7 November 2023 dan telah dinyatakan dalam akta tertanggal 9 November 2023 No.3, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan untuk mencairkan Modal Dasar, Modal Ditempat dan Modal Disorot Perseroan yang semula sebesar Rp. 10.551.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan atas pencairan modal ini dapat mengajukan keberatan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini, kepada:

PT FIDELITAS ALFA OMEGA
d/a Jl Wolter Monginsidi No.61C Blok Q/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan guna memenuhi ketentuan Pasal 44, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 November 2023.
Direksi
PT FIDELITAS ALFA OMEGA

PENGUMUMAN PENGANGPUAN

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1126/Pdt.P/2023/PN.Tng tanggal 13 Oktober 2023, yang amar penatapannya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menyatakan H. SATIRI berada dalam kondisi sakit Stroke sehingga berkonskuensi tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu;
 - Menyatakan sah secara hukum (veikar vor het recht) H. SATIRI berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum yang diampui, termasuk kepentingan keperdataannya;
 - Memberi izin kepada Pemohon selaku Pengampu H. SATIRI untuk menjual:
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan digunakan untuk bengkel cuci mobil sebasar 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02802 atas nama Satri Bin Haji Manap yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang;
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan digunakan untuk bengkel cuci mobil sebasar 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02801 atas nama Satri Bin Haji Manap yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang;
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan digunakan untuk bengkel cuci mobil sebasar 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02801 atas nama Satri Bin Haji Manap yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberitahukan Penetapan yang Pengampu dalam permohonan ini kepada Balai Harta Peninggalan di Jakarta;
 - Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas rupiah).
- Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 444 KUHPerdata dan diberitahukan kepada para pihak yang merasa keberatan atas Penetapan Pengadilan tersebut di atas agar menyampaikan keberatannya disertai dengan bukti-bukti yang cukup kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Pengampu Pengawas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pengumuman ini dimuat.
- Jakarta, 10 November 2023
Pengampu,
Tid
Hj. Hiwalah